

## BAB IV GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

### A. Letak Wilayah dan Luas Wilayah

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara  $5^{\circ}50'$  -  $7^{\circ}50'$  Lintang selatan dan  $104^{\circ}48'$  -  $108^{\circ}48'$  Bujur Timur, dengan luas wilayah daratan 3.710.061,32 hektare. Provinsi Jawa Barat sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten, sebelah timur berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, kemudian di wilayah bagian utara sebagian daerah berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.



**Gambar 4.1**

**Peta Wilayah Geografis Provinsi Jawa Barat**

Sumber: PDRB Jawa Barat 2015

Secara administratif sejak tahun 2008, jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat berjumlah 26 kabupaten/kota terdiri atas kabupaten dan 9 kota dengan 625 kecamatan dan 5.877 desa/kelurahan. Ibukota Provinsi Jawa Barat adalah Kota Bandung, selain itu di Provinsi Jawa Barat ada sistem pembagian dalam 4 Badan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan (Bakor PP) wilayah sebagai berikut ([www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id));

1. Wilayah I Bogor meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.
2. Wilayah II Purwakarta meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.
3. Wilayah III Cirebon meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.
4. Wilayah IV Priangan meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar

Profil geografis Provinsi Jawa Barat tentu mempunyai karakteristik sendiri, berbicara mengenai Jawa Barat berarti berbicara tentang pedesaan dan perkotaan, berbeda seperti Provinsi DKI Jakarta yang hampir seluruh wilayahnya adalah perkotaan. Di Jawa Barat memiliki daerah pesisir pantai, perkebunan di kaki gunung, pusat perkembangan kota seperti di Kota Bandung, bahkan sampai daerah pusat industri seperti di Karawang dan Bekasi, beberapa gambaran wilayah Provinsi

Jawa Barat tersebut menjadi asumsi penting untuk menjadi analisis dalam penelitian ini.

## **B. Distribusi Penduduk Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk (SP) di Jawa Barat Tahun 2016**

Profil kependudukan di Jawa Barat menunjukkan distribusi penduduk yang terbagi di daerah pedesaan dan perkotaan yang berbeda karena tidak terdistribusi seimbang, maka analisis perekonomian di provinsi ini bisa menggunakan asumsi-asumsi mengenai kependudukan sebagai pertimbangan identifikasi aspek ekonomi, seperti basis ekonomi yang dimiliki serta migrasi yang terjadi mempengaruhi atmosfer mobilitas ekonomi yang terjadi.

Distribusi penduduk berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2016 di Jawa Barat mayoritas penduduk Jawa Barat tinggal di daerah pedesaan yaitu senilai 78,65% dari keseluruhan populasi penduduk provinsi dengan Kabupaten Bogor yang menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 11,79% dari seluruh penduduk provinsi dan populasi terendah di daerah kabupaten Bogor yaitu Kabupaten Purwakarta dengan presentase 1,97%.

Distribusi penduduk di daerah perkotaan di Jawa Barat tidak sebanyak di daerah pedesaan yaitu dengan presentase 22,24% dari keseluruhan penduduk provinsi yaitu dengan Kota Bandung dan Kota Bekasi sebagai kota yang memiliki populasi penduduk terbanyak di daerah perkotaan Provinsi Jawa Barat dengan presentase masing-masing yaitu 5,26% dan 5,88%, sedangkan populasi dengan

jumlah terendah yaitu Kota Banjar dengan presentase 0,38%. Dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Penduduk Provinsi Daerah Jawa Barat di Daerah Pedesaan**  
**Tahun 2016**

No.	Kabupaten	Distribusi (%)
1.	Bogor	11,79
2.	Sukabumi	5,16
3.	Cianjur	4,75
4.	Bandung	7,59
5.	Garut	5,42
6.	Tasikmalaya	3,68
7.	Ciamis	2,48
8.	Kuningan	2,24
9.	Cirebon	4,52
10.	Majalengka	2,51
11.	Sumedang	2,41
12.	Indramayu	3,59
13.	Subang	3,26
14.	Purwakarta	1,97
15.	Karawang	4,85
16.	Bekasi	7,12
17.	Bandung Barat	3,48
	<b>Kota</b>	
18.	Bogor	2,25
19.	Sukabumi	0,69
20.	Bandung	5,26
21.	Cirebon	0,66
22.	Bekasi	5,88
23.	Depok	4,60
24.	Cimahi	1,25
25.	Tasikmalaya	1,39
26.	Banjar	0,38
	<b>Total</b>	<b>100%</b>

Sumber: BPS Jawa Barat

Dari ketidakmerataan distribusi penduduk antara daerah yang tergolong pedesaan dan perkotaan bisa menjadi asumsi-asumsi pertimbangan analisis mengenai aktifitas ekonomi yang terjadi di Provinsi ini, misalkan seperti fasilitas

publik dan pembangunan ekonomi yang tidak merata, serta kemungkinan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antara kedua daerah tersebut karena pembangunan ekonomi tersentralisasi di salahsatu daerah tersebut.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2012 dan 2016**

Tahun.	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan dari Tahun Sebelumnya
2012	44.643.586	-
2013	45.340.799	1,56%
2014	46.029.668	1,51%
2015	46.709.569	1,47%
2016	47.379.389	1,43%

Sumber: PDRB Jawa Barat Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas pertumbuhan jumlah penduduk pada tahun 2013 naik sebesar 1,56% dengan jumlah penduduk sebesar 45.340.799 jiwa dari tahun 2012, pada tahun 2014 naik sebesar 1,51% dengan jumlah penduduk sebesar 46.029.668 jiwa dari tahun 2013, pada tahun 2015 naik sebesar 1,47% dengan jumlah penduduk sebesar 46.709.569 jiwa dari tahun 2014 dan pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 1,43% dengan jumlah penduduk sebesar 47.379.389 jiwa dari tahun 2015.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2012 dan 2016**

No	Kabupaten/Kota	2012	2016	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Bogor	5.073.116	5.587.390	10.14
2	Sukabumi	2.393.191	2.444.616	2.15
3	Cianjur	2.213.889	2.250.977	1.67
4	Bandung	3.339.684	3.596.623	7.69
5	Garut	2.477.114	2.569.505	3.73
6	Tasikmalaya	1.710.426	1.742.276	1.82
7	Ciamis	1.148.782	1.175.389	2.31
8	Kuningan	1.036.494	1.061.886	2.44
9	Cirebon	2.076.615	2.142.999	3.19
10	Majalengka	1.164.724	1.188.004	1.99
11	Sumedang	1.117.919	1.142.097	2.16
12	Indramayu	1.663.397	1.700.815	2.25
13	Subang	1.480.708	1.546.000	4.41
14	Purwakarta	885.386	932.701	5.34
15	Karawang	2.199.394	2.295.778	4.38
16	Bekasi	2.884.300	3.371.691	16.99
17	Bandung Barat	1.567.398	1.648.387	5.17
19	Kota Bogor	995.081	1.064.687	6.99
20	Kota Sukabumi	308.405	321.097	4.11
21	Kota Bandung	2.444.617	2.490.622	1.89
22	Kota Cirebon	298.825	310.486	3.90
23	Kota Bekasi	2.498.598	2.787.205	11.55
24	Kota Depok	1.891.981	2.179.813	15.21
25	Kota Cimahi	562.721	594.021	5.56
26	Kota Tasikmalaya	648.178	659.606	1.76
27	Kota Banjar	178.728	181.901	1.77

Sumber: BPS Jawa Barat.

Berdasarkan dari data tabel di atas, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami kenaikan tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk terbanyak terjadi pada Kabupaten Bekasi sebesar 16.99%,

kemudian pertumbuhan penduduk terendah berada di Kabupaten Cianjur dengan angka 1.67%.

### C. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat diukur secara kolektif melalui Produk Domestik Regional Produk yang mempunyai komposisi dari berbagai sektor ekonomi yang tersedia di daerah tersebut, kemudian fluktuasi PDRB tersebut dapat menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dari tahun ke tahun. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2016 dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**

**Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2016**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>
2011	1.285.252.469,07	-
2012	1.382.443.183,63	0,0756
2013	1.489.951.923,02	0,0778
2014	1.584.087.199,41	0,0631
2015	1.669.682.214,41	0,054
2016	1.763.555.877,95	0,0562

Sumber: BPS Jawa Barat

Berdasarkan tabel di atas, nilai PDRB Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 1.285.252.469,07 dan tahun 2016 menjadi 1.763.555.877,95, kemudian Laju Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat setidaknya setiap tahun mengalami kenaikan sebesar 5,5%, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,7%.

Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam menghasilkan atau menggunakan barang dan jasa, maka akan dilihat dari Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) per kapita. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui jumlah barang dan jasa yang digunakan oleh masyarakat. PDRB per kabupaten/kota dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat**  
**Tahun 2012-2015 (Juta Rupiah)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kab Bogor	23.72	26.12	28.38	30.79
Kab Sukabumi	14.18	15.97	17.55	19.28
Kab Cianjur	10.74	11.91	12.94	14.42
Kab Bandung	17.98	19.93	22.01	24.28
Kab Garut	12.26	13.46	14.68	15.96
Kab Tasikmalaya	11.13	12.37	13.44	14.79
Kab Ciamis	14.60	16.16	17.55	19.58
Kab Kuningan	11.53	12.91	14.30	16.10
Kab Cirebon	12.66	14.05	15.44	16.81
Kab Majalengka	13.47	14.99	16.32	17.98
Kab Sumedang	16.23	18.01	19.75	21.83
Kab Indramayu	35.70	37.85	40.20	38.66
Kab Subang	15.57	16.52	17.72	19.16
Kab Purwakarta	40.20	45.22	49.99	54.41
Kab Karawang	56.50	63.64	69.47	73.51
Kab Bekasi	65.24	68.64	72.88	75.80
Kab Bandung Barat	15.40	17.24	19.06	20.85
Kab Pangandaran	15.59	17.32	18.74	20.92
Kota Bogor	23.37	25.75	28.28	30.88
Kota Sukabumi	21.11	23.44	25.84	28.18
Kota Bandung	53.99	61.74	69.89	78.91
Kota Cirebon	41.11	45.11	49.37	54.32
Kota Bekasi	20.69	22.45	24.26	26.10
Kota Depok	17.59	19.69	21.54	23.05
Kota Cimahi	29.32	32.20	35.52	38.61
Kota Tasikmalaya	17.10	18.87	20.81	23.17
Kota Banjar	13.80	15.36	16.68	18.36

Sumber: BPS Jawa Barat

Berdasarkan tabel di atas, nilai PDRB per Kabupaten/Kota di Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2012 jumlah PDRB tertinggi berada di Kabupaten Bekasi sebesar 65.24, terendah berada di kabupaten Cianjur sebesar 10.74, pada tahun 2013 tertinggi berada di Kabupaten Bekasi sebesar 68.64, terendah berada di Kabupaten Cianjur sebesar 11.91, pada tahun 2014 jumlah PDRB terbesar berada di Kabupaten Bekasi sebesar 72.88, terendah berada di Kabupaten Cianjur sebesar 12.94, pada tahun 2015 jumlah PDRB terbesar berada di Kota Bandung sebesar 78.91, dan jumlah PDRB terendah berada di Kabupaten Cianjur sebesar 14.42.

#### **D. Profil Kemiskinan Provinsi Jawa Barat**

Dalam mengetahui karakteristik dan atau profil antropologi suatu masyarakat, salah satu indikator penting adalah dimensi perekonomian berdasarkan kondisi ekonomi penduduk tersebut, salah satu cara mengetahui kondisi ekonomi dan batas kemampuan konsumsi dari masyarakat adalah dengan mengetahui garis kemiskinan sebagai ukuran batas kemampuan konsumsi masyarakat secara umum. Artinya karakter antropologis berdasarkan dimensi perekonomian masyarakat secara umum dapat diketahui melalui jumlah penduduk miskin. Sesuai dengan penelitian ini, berikut adalah profil kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 dan 2014.

**Tabel 4.6**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 dan 2014**

Tahun.	Garis Kemiskinan		Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
2013	281.189	268.251	2554,06	1756,49
2014	294.700	285.076	2626,16	1684,90

Sumber: PDRB Jawa Barat tahun 2015

Berdasarkan data tersebut, dapat menjelaskan profil kemiskinan di Jawa Barat berdasarkan daerah perkotaan dan pedesaan baik berdasarkan tingkat Garis Kemiskinan maupun Jumlah Penduduk Miskin (dalam satuan ribu). Garis Kemiskinan di Jawa Barat untuk daerah perkotaan pada tahun 2013 yaitu 281.189 dan di daerah pedesaan yaitu 268.251, kemudian pada tahun 2014 Garis Kemiskinan di Jawa Barat pada daerah perkotaan yaitu 294.700 dan pada daerah pedesaan yaitu 285,076.

Profil penduduk miskin yang ditunjukkan oleh Jumlah Penduduk Miskin (dalam satuan ribu) di Jawa Barat pada tahun 2013, diketahui bahwa di daerah perkotaan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat adalah sebanyak 2554,06 dan di daerah pedesaan sebanyak 1756,49, kemudian pada tahun selanjutnya yaitu 2014 di daerah perkotaan sebanyak 2626,16 dan di daerah pedesaan sebanyak 1684,90 penduduk miskin.

**Tabel 4.7**  
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat**  
**Tahun 2012-2016**

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	(%)
Provinsi Jawa Barat	9.18	9.53	8.95	-2.50
Kab Bogor	8.91	8.96	8.83	-0.84
Kab Sukabumi	8.81	8.96	8.13	-7.66
Kab Cianjur	11.47	12.21	11.62	1.32
Kab Bandung	7.65	8.00	7.61	-0.47
Kab Garut	12.47	12.81	11.64	-6.65
Kab Tasikmalaya	11.26	11.99	11.24	-0.20
Kab Ciamis	8.38	8.98	8.42	0.42
Kab Kuningan	12.72	13.97	13.59	6.82
Kab Cirebon	14.22	14.77	13.49	-5.14
Kab Majalengka	13.42	14.19	12.85	-4.22
Kab Sumedang	10.78	11.36	10.57	-1.93
Kab Indramayu	14.29	14.98	13.95	-2.35
Kab Subang	11.73	12.27	11.05	-5.79
Kab Purwakarta	8.80	9.14	8.98	2.09
Kab Karawang	10.15	10.37	10.07	-0.80
Kab Bekasi	4.97	5.27	4.92	-0.95
Kab Bandung Barat	12.26	12.67	11.71	-4.48
Kota Bogor	7.74	7.60	7.29	-5.84
Kota Sukabumi	7.65	8.79	8.59	12.25
Kota Bandung	4.65	4.61	4.32	-7.02
Kota Cirebon	10.03	10.36	9.73	-2.96
Kota Bekasi	5.25	5.46	5.06	-3.67
Kota Depok	2.32	2.40	2.34	0.83
Kota Cimahi	5.47	5.84	5.92	8.27
Kota Tasikmalaya	15.95	16.28	15.60	-2.22
Kota Banjar	6.95	7.41	7.01	0.93

Sumber: BPS Jawa Barat

Berdasarkan tabel di atas, persentase penduduk miskin per Kabupaten/Kota tahun 2012-2016 di Jawa Barat mengalami fluktuasi, persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kota Sukabumi dengan angka 12,25%, dan persentase penduduk miskin terendah berada di Kabupaten Tasikmalaya dengan angka -0,20%.

### E. Indeks Pembangunan Manusia Profinsi Jawa Barat

Indikator penting untuk mengetahui profil antropologis suatu penduduk adalah dengan mengetahui Indeks Pembangunan Manusia di wilayah penduduk tersebut, berikut adalah nilai IPM di Jawa Barat secara kolektif berdasarkan aspek-aspek penilaian IPM:

**TABEL 4.8**  
**Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat 2009-2013**

Tahun.	Indeks Pembangunan Manusia
2009	71,64
2010	72,29
2011	72,73
2012	73,11
2013	73,58

Sumber: PDRB Jawa Barat tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, secara umum nilai IPM kolektif di Jawa Barat sepanjang tahun 2009-2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 nilai IPM kolektif di Jawa Barat mempunyai nilai 71,64, pada tahun 2010 dengan nilai 72,29, pada tahun 2011 adalah 72,73, pada tahun 2012 adalah 73,11, dan pada tahun 2013 mempunyai nilai 73,58.

Adapun komponen-komponen yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), antara lain Angka Harapan Hidup (AHH), Indeks Kesehatan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan komponen lainnya. Berikut adalah tabel mengenai AHH Tahun 2012-2016, Indeks Kesehatan Tahun 2010-2014, APS Tahun 2012-2016 di Jawa Barat.

**TABEL 4.9**  
**Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2012-2016**

Tahun	Angka Harapan Hidup
2012	68,60
2013	68,84
2014	-
2015	72,41
2016	72,44

Sumber: BPS Jawa Barat

Berdasarkan tabel di atas, AHH Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan nilai sebesar 68,60 dan pada tahun 2013 AHH menunjukkan nilai sebesar 68,84. Sedangkan pada tahun 2015 AHH mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 72,41. Kemudian pada tahun 2016, AHH menunjukkan nilai sebesar 72,44.

**TABEL 4.10**  
**Indeks Kesehatan Penduduk Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2010-2014**

Tahun	Indeks Kesehatan
2010	78,91
2011	79,32
2012	79,72
2013	80,14
2014	80,35
2015	-
2016	-

Sumber: BPS Jawa Barat

Berdasarkan pada tabel di atas, Indeks Kesehatan Penduduk Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut ditandai dengan

peningkatan dari tahun 2010 sebesar 78,91 ke tahun 2011 sebesar 79,32. Kemudian pada tahun 2012 nilai Indeks Kesehatan sebesar 79,72. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 menunjukkan nilai Indeks Kesehatan masing-masing sebesar 80,14 dan 80,35.

**TABEL 4.11**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Provinsi Jawa Barat**  
**Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2012-2016**

Tahun	Kelompok Umur			
	7 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 24
<b>2012</b>	97,89	85,97	50,36	11,15
<b>2013</b>	98,36	88,68	56,30	12,25
<b>2014</b>	98,85	89,40	59,98	17,34
<b>2015</b>	99,30	92,84	65,48	19,27
<b>2016</b>	99,57	93,19	65,72	19,40

Sumber: BPS Jawa Barat

Angka partisipasi sekolah berdasarkan umur dari tahun 2012-2016 mayoritas mengalami peningkatan, pada kelompok umur 7-12 tahun meningkat dari semula 97,89% menjadi 99,57%, kemudian pada kelompok umur 13-15 tahun meningkat dari semula 85,97% menjadi 93,19%, begitu juga dengan kelompok umur 16-18 mengalami peningkatan dari semula adalah 50,36% menjadi 65,72, dan kelompok umur 19-24 mengalami peningkatan dari semula 11,15% menjadi 19,40%.

Dalam penelitian ini akan menggunakan data IPM Jawa Barat per kabupaten/kota pada tahun 2012-2016, tentunya akan menemui gejala berbeda pada setiap daerahnya dengan IPM kolektif provinsi. Berikut adalah tabel mengenai IPM menurut kabupaten/kota di Jawa Barat pada Tahun 2012-2016.

**TABEL 4.12**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Jawa Barat**  
**Tahun 2012-2016**

<b>Kabupaten/kota</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bogor	65.66	66.74	67.36	67.77	68.32
Sukabumi	62.27	63.63	64.07	64.44	64.44
Cianjur	60.28	61.68	62.08	62.42	62.92
Bandung	68.13	68.58	69.06	70.05	70.69
Garut	61.04	61.67	62.23	63.21	63.64
Tasikmalaya	61.69	62.40	62.79	63.17	63.57
Ciamis	66.29	67.20	67.64	68.02	68.45
Kuningan	65.60	66.16	66.63	67.19	67.51
Cirebon	64.48	65.06	65.53	66.07	66.70
Majalengka	63.13	63.71	64.07	64.75	65.25
Sumedang	67.36	68.47	68.76	69.29	69.45
Indramayu	62.09	62.98	63.55	64.36	64.78
Subang	64.86	65.48	65.80	66.52	67.14
Purwakarta	66.30	67.09	67.32	67.84	68.56
Karawang	65.97	66.61	67.08	67.66	68.19
Bekasi	69.38	70.09	70.51	71.19	71.83
Bandungbarat	63.17	63.93	64.27	65.23	65.81
Kota Bogor	72.25	72.86	73.10	73.65	74.50
Kota Sukabumi	69.74	70.81	71.19	71.84	72.33
Kota Bandung	78.30	78.55	78.98	79.67	80.13
Kota Cirebon	71.97	72.27	72.93	73.34	73.70
Kota Bekasi	77.71	78.63	78.84	79.63	79.95
Kota Depok	77.28	78.27	78.58	79.11	79.60
Kota Cimahi	74.99	75.85	76.06	76.42	76.69
Kota Tasikmalaya	67.84	68.63	69.04	69.99	70.58
Kota Banjar	67.53	68.01	68.34	69.31	70.09
<b>Rata-rata</b>	<b>67.50</b>	<b>68.28</b>	<b>68.69</b>	<b>69.32</b>	<b>69.80</b>

Sumber : BPS Jawa Barat

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pada tahun 2012 IPM terkecil adalah Kabupaten Cianjur dengan nilai 60,28% tertinggi adalah Kota Bandung

dengan nilai 78,30%, pada tahun 2013 IPM terkecil adalah Kabupaten Garut dengan nilai 61,67% tertinggi adalah Kota Bandung dengan nilai 78,55%, pada tahun 2014 IPM terkecil adalah Kabupaten Cianjur dengan nilai 62,08% tertinggi adalah Kota Bandung dengan nilai 78,98%, pada tahun 2015 IPM terkecil adalah Kabupaten Cianjur dengan nilai 62,42% tertinggi adalah Kota Bandung dengan nilai 79,67%, pada tahun 2016 IPM terkecil adalah Kabupaten Cianjur dengan nilai 62,92% tertinggi adalah Kota Bandung dengan nilai 80,13%.

Adapun rata-rata IPM per kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2012-2016 mengalami peningkatan. Rata-rata IPM per kabupaten/kota pada tahun 2012 sebesar 67,50%, pada tahun 2013 dengan nilai 68,28%, pada tahun 2014 dengan nilai 68,69%, kemudian pada tahun 2015 dengan nilai 69,32%, dan pada tahun 2016 dengan nilai 69,80%.

#### **F. Gini Ratio**

Gini ratio adalah salah satu metode pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan dengan memiliki nilai 0 sampai dengan 1, nilai gini ratio  $< 0,3$  mengindikasikan kondisi ketimpangan yang relatif rendah, kemudian nilai gini ratio  $0,3 < GR < 0,7$  mengindikasikan ketimpangan yang relatif sedang, dan nilai gini ratio  $> 0,7$  mengindikasikan ketimpangan yang sangat tinggi.

Informasi mengenai ketimpangan distribusi pendapatan diperlukan oleh setiap daerah untuk mengetahui persebaran distribusi kelompok pendapatan berdasarkan statistik, sehingga metode ini selalu digunakan untuk menghitung

ketimpangan distribusi pendapatan setiap daerah di Indonesia, berikut adalah tabel gini ratio kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2012-2016.

**TABEL 4.13**  
**Tabel Gini Ratio Kabupaten/Kota di Jawa Barat**  
**Tahun 2012-2016**

<b>Kabupaten/kota</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bogor	0.42	0.42	0.39	0.42	0.40
Sukabumi	0.35	0.35	0.32	0.36	0.33
Cianjur	0.33	0.33	0.28	0.28	0.36
Bandung	0.36	0.36	0.37	0.40	0.40
Garut	0.34	0.34	0.33	0.31	0.35
Tasikmalaya	0.33	0.33	0.29	0.30	0.30
Ciamis	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33
Kuningan	0.36	0.36	0.37	0.34	0.33
Cirebon	0.36	0.36	0.28	0.33	0.36
Majalengka	0.39	0.39	0.34	0.35	0.36
Sumedang	0.37	0.37	0.33	0.35	0.37
Indramayu	0.29	0.29	0.28	0.29	0.26
Subang	0.33	0.33	0.31	0.33	0.35
Purwakarta	0.39	0.39	0.37	0.35	0.36
Karawang	0.34	0.34	0.30	0.34	0.34
Bekasi	0.36	0.36	0.33	0.35	0.31
Bandungbarat	0.37	0.37	0.33	0.34	0.36
Kota Bogor	0.45	0.45	0.36	0.47	0.43
Kota Sukabumi	0.40	0.40	0.36	0.43	0.42
Kota Bandung	0.42	0.42	0.48	0.44	0.44
Kota Cirebon	0.41	0.41	0.40	0.41	0.40
Kota Bekasi	0.37	0.37	0.33	0.41	0.39
Kota Depok	0.40	0.40	0.37	0.40	0.40
Kota Cimahi	0.37	0.37	0.39	0.40	0.42
Kota Tasikmalaya	0.40	0.40	0.37	0.49	0.42
Kota Banjar	0.39	0.39	0.32	0.42	0.37
<b>Rata-rata</b>	<b>0.37</b>	<b>0.37</b>	<b>0.34</b>	<b>0.37</b>	<b>0.37</b>

Sumber: BPS Jawa Barat

Berdasarkan tabel 4.13, dapat diketahui ketimpangan pendapatan tertinggi pada tahun 2012 adalah Kota Bogor dengan gini ratio 0.45 dan gini ratio terendah adalah Kabupaten Indramayu dengan nilai 0.29, kemudian pada tahun 2013 gini ratio tertinggi adalah Kota Bogor dengan nilai 0.45 dan gini ratio terendah adalah Kabupaten Indramayu dengan nilai 0.29, pada tahun 2014 gini ratio tertinggi adalah Kota Bandung dengan nilai 0.48 dan terendah adalah Kabupaten Indramayu dengan nilai 0.28, pada tahun 2015 gini ratio tertinggi adalah Kota Tasikmalaya dengan nilai 0.49 dan terendah adalah Kabupaten Indramayu dengan nilai 0.29, pada tahun 2016 gini ratio tertinggi adalah Kota Bandung dengan nilai 0.44 dan terendah adalah Kabupaten Indramayu dengan nilai 0.26.

Adapun rata-rata gini ratio per kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2012-2016 cenderung stagnan. Pada tahun 2012-2013 nilai gini ratio tetap yaitu sebesar 0,37, hanya saja pada tahun 2014 terjadi penurunan nilai gini ratio menjadi sebesar 0,34, kemudian pada tahun 2015 rata-rata gini ratio per kabupaten/kota di Jawa Barat naik menjadi 0,37 dan tidak terjadi peningkatan maupun penurunan pada tahun 2016. Kemudian dari data gini ratio pada tabel 4.13, nilai gini ratio per kabupaten/kota di Jawa Barat mengindikasikan kondisi ketimpangan yang relatif sedang karena berada dibawah 0,7, jadi ketimpangan distribusi pendapatan per kabupaten/kota di Jawa Barat masih berada pada batas aman.